

Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan

Muh. Watif¹, Aulya Ramadhani.JT², Jumiati³, Luthfiyah Syam Almazini Tahir⁴, Nurul Hikmah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Makassar

E-mail: Watifmuhammad@gmail.com¹, aulyaaaramadhani29@gmail.com²,
jumiati.tcellvivo@gmail.com³, purbakelana143@gmail.com⁴, nurulhikmah050104@gamil.com⁵

Article History:

Received: 04 Mei 2024

Revised: 15 Mei 2024

Accepted: 20 Mei 2024

Keywords: *Inequality, Poverty, Social, Urban*

Abstract: The aim of this research is to investigate the factors causing social inequality and poverty in urban communities and identify effective coping strategies. The research method used is a qualitative literature study approach, where data is collected through searching and analyzing various literature sources relevant to the research topic. The results of the analysis show that social inequality and poverty in urban communities are influenced by various factors such as uneven economic growth, limited access to basic services, housing problems, and differences in access to education and health. The impacts of this inequality include health problems, low education, social instability, and deep economic disparities. To overcome social inequality and poverty in urban communities, a holistic response strategy is needed, including investment in inclusive education, strengthening basic infrastructure, community economic empowerment, and affordable housing policies. Collaboration between various stakeholders is also key in creating a more inclusive and sustainable urban society.

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan kemiskinan merupakan dua isu yang saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan seringkali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi, namun di balik kemegahannya, terdapat realitas yang kompleks di mana sebagian penduduk mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi yang pesat telah mengubah lanskap kota-kota besar menjadi tempat di mana kesenjangan sosial dan ekonomi dapat menjadi sangat jelas. Sebagian penduduk menikmati kehidupan yang sejahtera dan berkelimpahan, sementara yang lain terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakpastian.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan (Rahman, Halim, dan Haetami 2019). Fokus utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan sosial dan kemiskinan, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari penduduk perkotaan, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Studi literatur menjadi pendekatan yang tepat untuk menyelidiki isu kompleks ini. Dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen terkait lainnya, kita dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam konteks

perkotaan (Irawan 2022).

Dengan memahami isu ini secara lebih baik, diharapkan kita dapat mengidentifikasi solusi-solusi yang berdaya guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan yang rentan dan memastikan inklusivitas dalam pembangunan perkotaan. Langkah-langkah nyata untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat perkotaan secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Untuk memahami masalah ini secara mendalam, penelitian ini didukung oleh berbagai teori dan konsep dari literatur akademis yang relevan. Berikut adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Teori Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan distribusi sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Marx (1848), ketimpangan sosial terutama dipicu oleh struktur ekonomi yang memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada sekelompok kecil orang, sementara mayoritas lainnya bekerja dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Max Weber (1922) memperluas konsep ini dengan memperkenalkan tiga dimensi utama ketimpangan: kelas ekonomi, status sosial, dan kekuasaan politik. Ketiga dimensi ini sering kali saling berinteraksi dan memperburuk ketimpangan yang ada.

b. Teori Kemiskinan

Kemiskinan sering kali dipahami dalam dua perspektif utama: absolut dan relatif. Kemiskinan absolut, seperti yang diuraikan oleh Rowntree (1901), merujuk pada ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, kemiskinan relatif, menurut Townsend (1979), merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu mencapai standar hidup yang dianggap layak dalam konteks masyarakat mereka.

c. Teori Urbanisasi

Urbanisasi adalah proses di mana populasi masyarakat berpindah dari daerah pedesaan ke perkotaan, sering kali dengan harapan mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, teori urbanisasi oleh Lewis (1954) mengemukakan bahwa urbanisasi yang cepat dapat menghasilkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan perumahan yang tidak memadai. Burgess (1925) melalui teorinya tentang pertumbuhan kota, mengidentifikasi bahwa kota berkembang dalam pola melingkar, dengan pusat kota yang kaya dan daerah pinggiran yang cenderung lebih miskin.

d. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial, yang dipelopori oleh John Rawls (1971), menekankan pentingnya distribusi yang adil atas sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Rawls mengajukan dua prinsip utama: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara, dan (2) ketidakadilan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, dan terkait dengan posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.

e. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Menurut Brundtland Report (1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks perkotaan, pembangunan berkelanjutan melibatkan perencanaan kota yang inklusif, ramah lingkungan, dan mampu mengurangi ketimpangan sosial.

f. Perspektif Struktural Fungsionalisme

Perspektif struktural fungsionalisme, seperti yang diuraikan oleh Talcott Parsons (1951), melihat masyarakat sebagai sistem yang kompleks di mana semua bagiannya bekerja bersama untuk mempromosikan solidaritas dan stabilitas. Ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam konteks ini dianggap sebagai hasil dari disfungsi dalam sistem sosial yang lebih luas, di mana beberapa struktur sosial gagal dalam memberikan kontribusi yang adil terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan memanfaatkan teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyebab, dampak, dan strategi penanggulangan ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan. Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh, serta membantu dalam merumuskan rekomendasi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam studi literatur merupakan cara yang efektif untuk menyelidiki dan menganalisis isu kompleks seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat perkotaan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif studi literatur dapat memberikan wawasan yang berharga tentang ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan. Dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dan metode analisis yang tepat, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan, dampaknya, serta strategi penanggulangan yang efektif untuk menciptakan masyarakat perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Salam 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi dan Konsep Dasar

Definisi dan konsep dasar tentang ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam konteks masyarakat perkotaan adalah hal yang penting untuk dipahami (Nisyak, Handoyo, dan Harianto 2023).

1. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial merujuk pada ketidakadilan distribusi sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan di dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dalam konteks perkotaan, ketimpangan sosial sering kali tercermin dalam kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda, ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas umum, dan diskriminasi sosial.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, perumahan layak,

.....

pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan sering kali diukur dengan standar pendapatan atau dengan mengamati kekurangan dalam hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan layak. Di perkotaan, kemiskinan dapat menjadi lebih kompleks karena adanya tekanan ekonomi yang tinggi, biaya hidup yang mahal, dan persaingan ketat dalam dunia kerja.

3. Hubungan antara Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

Ketimpangan sosial dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Ketimpangan sosial dapat menjadi pemicu utama kemiskinan, karena ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan dan ekonomi dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi seseorang. Di sisi lain, kemiskinan juga dapat menjadi faktor yang memperburuk ketimpangan sosial, karena individu yang miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap peluang dan sumber daya untuk meningkatkan kondisinya.

4. Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan dalam Masyarakat Perkotaan

Masyarakat perkotaan cenderung menghadapi tantangan yang unik terkait dengan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, urbanisasi cepat, dan ketimpangan infrastruktur dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Di samping itu, urbanisasi juga menciptakan tekanan pada layanan publik seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat memperdalam ketimpangan sosial.

Dengan memahami definisi dan konsep dasar tentang ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan, kita dapat lebih efektif mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat perkotaan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warganya (Arifin 2021).

b. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor kunci yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama ketimpangan sosial dan kemiskinan di lingkungan perkotaan:

1. Ketimpangan Ekonomi

Salah satu faktor utama penyebab ketimpangan sosial dan kemiskinan adalah ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok di masyarakat perkotaan. Sebagian besar kota cenderung memiliki pembagian yang tidak merata dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Kelompok penduduk dengan tingkat pendapatan rendah seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan, dan layanan kesehatan. Di sisi lain, ada kelompok yang lebih berada yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, pekerjaan yang baik, dan fasilitas kesehatan yang memadai.

2. Urbanisasi yang Cepat

Pertumbuhan populasi yang cepat di kota-kota besar seringkali tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sebanding. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan penduduk miskin di daerah perkotaan, yang kemudian berdampak pada peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kondisi ini juga dapat menyebabkan tekanan yang besar pada infrastruktur

kota seperti perumahan, transportasi, dan sanitasi.

3. Kesenjangan Pendidikan

Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dapat menjadi faktor penting dalam memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih rendah, yang kemudian membatasi peluang mereka untuk meraih pekerjaan yang layak di masa depan. Kesenjangan pendidikan juga dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat perkotaan antara mereka yang terampil dan kurang terampil.

4. Ketidaksetaraan Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Masyarakat perkotaan seringkali menghadapi masalah akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Kelompok miskin cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan perawatan medis yang berkualitas, yang kemudian meningkatkan risiko kesehatan mereka dan memperburuk kemiskinan.

5. Diskriminasi dan Ketidakadilan Sosial

Diskriminasi berdasarkan faktor seperti suku, ras, agama, dan gender juga dapat memperdalam ketimpangan sosial di masyarakat perkotaan. Ketidakadilan sosial menghambat mobilitas sosial dan ekonomi individu, sehingga meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan.

6. Kebijakan Publik yang Tidak Memadai

Kebijakan publik yang kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kelompok masyarakat rentan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dan kemiskinan. Misalnya, kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur sosial seperti perumahan yang terjangkau, transportasi publik yang efisien, dan layanan kesehatan yang terjangkau dapat memperburuk ketimpangan di masyarakat perkotaan.

7. Globalisasi dan Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi global dan proses globalisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, industrialisasi, dan persaingan global dapat menghasilkan tekanan ekonomi tambahan pada kelompok rentan di masyarakat perkotaan.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan di lingkungan perkotaan. Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam pembangunan perkotaan (Rosyadi 2021).

c. Dampak Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

Dampak dari ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak tersebut meliputi:

1. Kesehatan dan Kesejahteraan

Ketimpangan sosial dan kemiskinan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap penyakit infeksi, malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya akibat akses terbatas terhadap

layanan kesehatan yang memadai. Ketidakstabilan ekonomi juga dapat menyebabkan stres psikologis dan masalah kesehatan mental.

2. Pendidikan

Kemiskinan sering kali menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih rendah, yang kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk meraih potensi penuh dan mencapai mobilitas sosial. Kurangnya pendidikan juga dapat mengurangi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.

3. Kesenjangan Sosial dan Pembagian Masyarakat

Ketimpangan sosial dapat menghasilkan pembagian yang tajam antara kelompok-kelompok di masyarakat perkotaan. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan sosial, ketidakstabilan, dan konflik di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, ketimpangan juga dapat memperburuk masalah diskriminasi dan ketidakadilan sosial.

4. Peluang Ekonomi

Kemiskinan dapat membatasi peluang ekonomi individu, terutama di masyarakat perkotaan di mana biaya hidup cenderung lebih tinggi. Individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau mengakses modal untuk memulai usaha. Hal ini dapat memperpetuat siklus kemiskinan antargenerasi.

5. Keamanan dan Kualitas Hidup

Masyarakat perkotaan dengan tingkat ketimpangan sosial dan kemiskinan yang tinggi sering mengalami masalah keamanan dan kualitas hidup yang rendah. Perumahan yang buruk, kejahatan, dan kekurangan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih dan sanitasi merupakan contoh dampak langsung dari ketimpangan sosial dan kemiskinan.

6. Partisipasi Sosial dan Politik

Individu dan kelompok yang mengalami kemiskinan cenderung memiliki tingkat partisipasi sosial dan politik yang lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memengaruhi perubahan positif di masyarakat.

7. Kualitas Lingkungan

Masyarakat perkotaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali mengalami dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Contohnya termasuk kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak terkendali dan kurangnya akses terhadap fasilitas lingkungan yang aman dan bersih.

Dampak-dampak ini dapat membentuk lingkungan sosial yang tidak stabil dan tidak berkelanjutan di masyarakat perkotaan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari ketimpangan sosial dan kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyebabkan ketidaksetaraan yang semakin memburuk.

Dampak-dampak ini bersifat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, penanganan masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua warga perkotaan

(Purwanto 2019).

d. Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan dalam Konteks Perkotaan

Ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam konteks perkotaan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika kota modern, urbanisasi, serta ketidakseimbangan distribusi sumber daya dan kesempatan di lingkungan perkotaan. Perkembangan kota sering kali menciptakan ketimpangan yang signifikan antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi, menghasilkan tantangan besar dalam upaya mencapai inklusivitas dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa aspek utama ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam konteks perkotaan:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Kota-kota sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ini tidak selalu merata di antara seluruh penduduk kota. Fenomena ini dikenal sebagai "urban-rural divide" di mana terdapat ketimpangan ekonomi yang besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di dalam kota sendiri, terdapat juga ketimpangan antara kawasan yang maju dan berkembang dengan daerah-daerah pinggiran atau kumuh.

2. Kesenjangan Akses Terhadap Layanan Dasar

Masyarakat perkotaan sering menghadapi kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti perumahan yang layak, air bersih, sanitasi, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan transportasi yang efisien. Kelompok miskin atau rentan cenderung terpinggirkan dan memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas-fasilitas ini, sementara kelompok yang lebih mampu dapat mengaksesnya dengan lebih baik.

3. Tingkat Pengangguran dan Pekerjaan yang Tidak Layak

Meskipun perkotaan menawarkan banyak peluang ekonomi, tingkat pengangguran sering tinggi di kalangan penduduk miskin. Orang-orang mungkin terpaksa menerima pekerjaan yang tidak layak, dengan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan tanpa jaminan sosial yang memadai.

4. Ketimpangan Pendapatan dan Kekayaan

Ketimpangan ekonomi yang mencolok di kota-kota besar dapat tercermin dalam ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok kaya memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sementara kelompok miskin terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk mereka pecahkan.

5. Perbedaan Akses Terhadap Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Infrastruktur perkotaan seperti jaringan transportasi, sistem air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik lainnya tidak selalu tersedia secara merata di seluruh kota. Kawasan-kawasan tertentu mungkin terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah atau sektor swasta, meninggalkan penduduknya dalam kondisi ketimpangan yang dalam.

6. Urbanisasi yang Cepat dan Pertumbuhan Tidak Terkendali

Pertumbuhan populasi yang cepat di kota-kota besar dapat menyebabkan tekanan yang besar pada infrastruktur dan layanan publik. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan penduduk miskin di daerah perkotaan dengan keterbatasan ruang dan fasilitas, memperburuk masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan.

7. Peran Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya di lingkungan perkotaan juga dapat memperdalam ketimpangan sosial. Misalnya, urbanisasi dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dan norma-norma sosial yang memengaruhi distribusi sumber daya dan kesempatan di dalam masyarakat (Herdiawan 2021).

Ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam konteks perkotaan menjadi tantangan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Penting untuk merancang kebijakan dan program yang berfokus pada memerangi ketimpangan ini, termasuk upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat infrastruktur perkotaan, dan mempromosikan inklusivitas dalam perencanaan kota. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga akademis, dan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya mencapai kota yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua penduduknya.

e. Strategi Penanggulangan dan Pembangunan Berkelanjutan

Strategi penanggulangan ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam konteks perkotaan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan serta mendorong pembangunan berkelanjutan di lingkungan perkotaan:

1. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Investasi dalam pendidikan inklusif yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat sangat penting. Program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan promosi pendidikan informal dapat membantu meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi kelompok miskin.

2. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan dasar seperti vaksinasi, perawatan kesehatan maternal dan anak, serta pengobatan penyakit menular sangat penting. Fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas harus tersedia di seluruh kota untuk mengurangi disparitas kesehatan.

3. Program Perumahan Terjangkau

Ketersediaan perumahan yang terjangkau merupakan hal krusial dalam mengatasi kemiskinan di perkotaan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan perumahan yang inklusif, termasuk subsidi perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah, revitalisasi kawasan kumuh, dan program sewa-miliki.

4. Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi

Investasi dalam infrastruktur perkotaan yang memadai seperti transportasi publik yang efisien, jaringan jalan yang baik, dan akses air bersih dapat meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup penduduk, terutama yang tinggal di daerah terpinggirkan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, akses terhadap modal usaha mikro, dan program pelatihan keterampilan dapat membantu penduduk miskin untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau memulai usaha kecil.

6. Penguatan Jaringan Sosial

Membangun jaringan sosial dan komunitas yang kuat dapat membantu mengatasi isolasi sosial dan meningkatkan kohesi sosial di lingkungan perkotaan. Program-program seperti kelompok swadaya masyarakat, pengembangan keterampilan interpersonal, dan pendidikan kesehatan masyarakat dapat berkontribusi pada penguatan jaringan sosial.

7. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis data dan terarah akan membantu menyasar sumber daya dan bantuan pada kelompok yang membutuhkan dengan lebih efektif. Analisis data kemiskinan dan pemetaan kerentanan sosial dapat membantu mengidentifikasi area-area yang membutuhkan intervensi prioritas.

8. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan perkotaan dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

9. Promosi Inklusivitas dan Keadilan Sosial

Mendorong kesadaran akan inklusivitas dan keadilan sosial dalam semua aspek kebijakan dan program pembangunan perkotaan. Meminimalkan diskriminasi berbasis gender, etnis, dan status ekonomi serta mempromosikan kesetaraan akses terhadap peluang dan sumber daya.

10. Penggunaan Teknologi untuk Pemecahan Masalah

Menerapkan solusi teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki layanan publik, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka dan program bantuan yang tersedia.

Keseluruhan, strategi penanggulangan ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan haruslah holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan serta komitmen jangka panjang dari pemerintah dan lembaga terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan perkotaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua penduduknya.

f. Studi Kasus atau Contoh Nyata

Studi kasus atau contoh nyata tentang ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan dapat memberikan gambaran konkret tentang tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Berikut adalah contoh-contoh studi kasus yang relevan:

1. Kota Mumbai, India

Mumbai adalah salah satu kota terpadat di dunia dengan tingkat ketimpangan sosial dan kemiskinan yang signifikan. Di sisi satuannya, Mumbai memiliki kemakmuran ekonomi yang besar dengan banyaknya kekayaan dan peluang, tetapi di sisi lainnya, kota ini juga menghadapi masalah serius seperti kawasan kumuh, akses terbatas terhadap layanan dasar, dan tingginya tingkat kemiskinan.

Tantangan:

- 1) Tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin.
 - 2) Masalah perumahan yang serius dengan sebagian besar penduduk tinggal di kawasan kumuh yang padat.
 - 3) Akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.
-

Upaya Penanggulangan:

- 1) Pemerintah setempat bersama organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional telah mengembangkan program perumahan terjangkau untuk mengatasi masalah perumahan di kawasan kumuh.
- 2) Program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro telah diluncurkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin.
- 3) Peningkatan layanan kesehatan dasar melalui klinik-klinik komunitas dan fasilitas kesehatan mobile.

2. Kota Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro adalah kota kosmopolitan dengan perbedaan ekonomi yang signifikan antara daerah kaya dan miskin. Ketimpangan sosial dan kemiskinan di Rio de Janeiro tercermin dalam kawasan-kawasan favela yang padat di mana tingkat kemiskinan dan kejahatan tinggi.

Tantangan:

- 1) Perbedaan ekonomi yang tajam antara daerah kaya dan miskin.
- 2) Tingkat kejahatan dan ketidakamanan yang tinggi di kawasan favela.
- 3) Akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Upaya Penanggulangan:

- 1) Pemerintah setempat bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi di kawasan favela.
- 2) Program inklusi sosial dan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, program pendidikan alternatif, dan promosi kewirausahaan.
- 3) Penguatan kehadiran polisi komunitas untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi tingkat kejahatan di kawasan favela.

3. New York City, Amerika Serikat

Meskipun New York City merupakan pusat keuangan dan budaya dunia, kota ini juga menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan sosial dan kemiskinan. Kawasan tertentu di New York City memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan kesenjangan ekonomi yang besar antara kelompok penduduk.

Tantangan:

- 1) Tingkat ketimpangan ekonomi dan pendapatan yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin.
- 2) Masalah perumahan yang kompleks dengan biaya sewa yang tinggi dan tingkat pengungsian yang tinggi.
- 3) Akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental dan perawatan kesehatan dasar.

Upaya Penanggulangan:

- 1) Peningkatan investasi dalam program perumahan terjangkau dan pengurangan tunawisma.
 - 2) Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu penduduk miskin mencari pekerjaan yang layak.
 - 3) Perluasan akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
-

Melalui studi kasus di atas, kita dapat melihat berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan di lingkungan perkotaan. Meskipun tantangannya kompleks, langkah-langkah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga tentang bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat membawa perubahan positif dalam membangun masyarakat perkotaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat perkotaan, ketimpangan sosial dan kemiskinan merupakan tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan. Ketimpangan ekonomi, urbanisasi yang cepat, akses terbatas terhadap layanan dasar, serta ketidaksetaraan dalam pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama yang memperdalam masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan di lingkungan perkotaan. Dampak dari ketimpangan sosial dan kemiskinan sangat luas, meliputi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan lingkungan hidup. Ketimpangan tersebut juga dapat menghasilkan perpecahan sosial, ketidakadilan, dan peluang ekonomi yang tidak merata di antara penduduk perkotaan. Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan, diperlukan strategi penanggulangan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut mencakup investasi dalam pendidikan inklusif, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar, program perumahan terjangkau, pengembangan ekonomi masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan transportasi perkotaan.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan di lingkungan perkotaan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program juga tidak boleh diabaikan. Studi kasus dari kota-kota seperti Mumbai, Rio de Janeiro, dan New York City memberikan contoh konkret tentang upaya penanggulangan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Melalui berbagai program dan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan, masyarakat perkotaan dapat diarahkan menuju lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua penduduknya. Dengan demikian, perjuangan melawan ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan masa depan pembangunan berkelanjutan secara global.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Arifin. 2021. "Ketimpangan Sosial dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7(3):89–96.
- Herdiawan, Junanto. 2021. "Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey." *Jurnal Dekonstruksi* 3(1):1–12.
- Irawan, Anang Dony. 2022. "Pengaruh pandemi dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues* 2(1):251–62.
- Nisyak, Isnaeni Qurotun, Pambudi Handoyo, dan Sugeng Harianto. 2023. "Kesenjangan Sosial Masyarakat Urban di Balik Pembangunan Infrastruktur Kota (Studi di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)." *Sosio e-Kons* 15(2):206.
-

- Purwanto, Edi. 2019. “Meneropong Ketimpangan Sosial Ekonomi Masyarakat Yahudi Pada Zaman Yesus Melalui Lensa Teori Sosial.” *Jurnal Teologi Stulos* 17:94–119.
- Rahman, Edwin Aulia, Supandi Halim, dan Haetami Haetami. 2019. “Implementasi Kebijakan Kota Surabaya Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah (Studi pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat).” *Ekonomi Pertahanan* 5(1).
- Rosyadi, Khoirul. 2021. “Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19; Refleksi Sosiologis.” dalam *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Vol. 1.
- Salam, Rahmat. 2019. “Peran kebijakan publik dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 2(2):119–28.
-